

PENERAPAN INSTRUMEN MONETER DALAM SISTEM PEREKONOMIAN ISLAM

Cindi Ida Febrianti¹, Rifti Dea Yopi Vita Ayu Irara², Lathifatul Fikriyah³, Nadya Futihatul Amalya⁴, Alfian Rizka Syahrianu⁵, Amalia Nuril Hidayati⁶
cindiidaf@gmail.com¹, irararifti@gmail.com², lathifatulfikriyah82@gmail.com³,
nadyaamalya36@gmail.com⁴, alifrizky766@gmail.com⁵, amalianoeril@gmail.com⁶
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

ABSTRAK

Instrumen moneter dalam ekonomi islam memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan sistem konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai instrumen kebijakan moneter islam, aplikasinya dalam sistem keuangan, serta tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Instrumen kebijakan moneter islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa instrumen yang umum digunakan antara lain kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dan merealisasikan tujuan sosiol-ekonomi. Meskipun memiliki potensi yang besar, penerapan instrumen moneter islam masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur keuangan, dan persaingan dengan sistem konvensional. Pengembangan instrumen moneter islam ke depan perlu terus dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Instrumen Moneter Islam, Prinsip Syariah, Kontrol Kuantitatif, Ekonomi Islam.

ABSTRACT

Monetary instruments in the Islamic economy have unique characteristics that are different from the conventional system. This study aims to examine various Islamic monetary policy instruments, their application in the financial system, as well as the challenges and constraints faced in their implementation. Islamic monetary policy instruments are based on sharia principles that avoid usury and promote sustainable economic growth. Some of the commonly used instruments include quantitative controls on lending and the realization of socio-economic goals. Despite its great potential, the implementation of Islamic monetary instruments still faces a number of challenges, such as lack of public understanding, limited financial infrastructure, and competition with conventional systems. The development of Islamic monetary instruments in the future needs to continue to overcome these challenges and encourage more inclusive and sustainable economic growth.

Keywords: Islamic Monetary Instruments, Sharia Principles, Quantitative Control, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam, sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah, semakin mendapat perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Aspek penting dari ekonomi Islam adalah kebijakan moneter. Dalam konteks tradisional, kebijakan moneter bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam kerangka ekonomi Islam, instrumen dan tujuan kebijakan moneter memiliki karakteristik yang unik.

Instrumen kebijakan keuangan syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan instrumen tradisional. Meskipun dokumen tradisional sering kali berfokus pada penetapan suku bunga, dokumen Islam berfokus pada prinsip-prinsip Syariah seperti larangan riba, keadilan, dan transparansi. Penggunaan instrumen kebijakan keuangan syariah mempunyai potensi besar untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi konvensional. Misalnya,

prinsip pembagian manfaat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Selain itu, transparansi transaksi keuangan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

Kebijakan moneter ditetapkan dalam rencana pembangunan otoritas moneter yang dalam hal ini adalah bank sentral yaitu dengan cara mengubah besaran moneter dan suku bunga serta pelaksanaannya dilakukan oleh otoritas moneter dan lembaga keuangan. Kebijakan Moneter berperan sangat penting dalam perekonomian, kehadirannya diharapkan dapat berfokus pada stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan output.

Namun, pengembangan dan implementasi instrumen kebijakan keuangan syariah juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya standar dan peraturan yang jelas. Selain itu, terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang keuangan syariah juga menjadi kendala.

Tantangan lainnya adalah penolakan dari paran pelaku yang terbiasa dengan sistem keuangan tradisional. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, ilmuwan, dan masyarakat. Penting untuk melanjutkan penelitian dan pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif. Selain itu, perlu juga memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam instrumen kebijakan moneter dalam perekonomian Islam. Fokus penelitiannya adalah mengidentifikasi instrumen yang dapat diterapkan, menganalisis penerapan praktis instrumen tersebut, dan menilai perkembangan dan tantangan dalam penerapan sistem moneter Islam. Penulis berharap dengan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai instrumen kebijakan keuangan syariah, kita dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen) Penelitian berikut mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur dengan berorientasi akademik (academic-oriented literature), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Kemudian dalam pendekatannya digunakan pendekatan interpretatif. Pendekatan ini berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang fakta-fakta mekanisme cryptocurrencies dan berbagai pasal penting dalam ekonomi Islam. Melalui pendekatan ini pula memandang bahwa konsumerisme adalah sesuatu yang dinamis, berproses sebagaimana sistem moneter yang dinamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Instrumen Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter merupakan putusan pemerintah dalam memberikan dukungan aktivitas perekonomian dengan menggunakan isu yang berkenaan dengan peredaran uang di masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, kebijakan moneter diartikan sebagai salah satu

upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik. Dengan asumsi stabilitas ekonomi, maka dimaksudkan agar penerima melalui peredaran uang mengatur jumlah uang beredar untuk mewujudkan tujuan jangka pendek (optimalisasi tingkat produksi dan stabilitas harga) dan tujuan jangka panjang (kesejahteraan sosial), perilaku moneter berupa regulasi pemerintah. Hal inilah yang mendasari adanya kebijakan moneter, baik konvensional maupun syariah.

Instrumen kebijakan moneter Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dan realisasi tujuan sosio-ekonomi. Kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit mencakup beberapa tindakan, seperti Syarat Cadangan Statutor, Batas Kredit, Tabungan On-Demand, Kolam Common, Persuasi Moral, dan Instrumen Berbasis Ekuitas.

Syarat Cadangan Statutor mengharuskan bank komersial menempatkan sebagian dana demand deposit pada bank sentral. Batas Kredit adalah batasan nilai tertinggi kredit yang dapat diberikan bank komersial untuk memastikan penciptaan kredit sesuai dengan target moneter. Tabungan On-Demand memindahkan deposit pemerintah antara bank sentral dan komersial. Kolam Common meminta bank komersial menyisihkan sebagian deposit untuk mengatasi masalah likuiditas. Persuasi Moral melibatkan kontak personal antara bank sentral dan komersial. Instrumen Berbasis Ekuitas adalah instrumen yang berdasarkan penyertaan, direkomendasikan karena beberapa alasan tertentu.

Merealisasikan Tujuan Sosio Ekonomi, Memperlakukan Uang yang Diciptakan Sebagai Fai'. Uang yang diciptakan oleh Bank Sentral disebut sebagai uang fai', yang memberikan keuntungan karena biaya penciptaannya lebih kecil dari nilai nominalnya, dikenal sebagai seigniorage. Sehingga Bank Sentral seharusnya mengalokasikan uang fai' tersebut untuk proyek-proyek yang dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Pemerintah harus menggunakannya dengan bijak dan tidak hanya untuk proyek yang menguntungkan golongan kaya.

Dalam buku *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application* oleh Hossein Askari, Zamir Iqbal, Abbas menyebutkan bahwa "it's important to note that monetary policy acts indirectly, in the sense that it relies on the banking sector to increase or decrease lending to the private sector and on the private sector to act in the way the monetary authorities hope for." Yang artinya yaitu penting untuk dicatat bahwa kebijakan moneter bertindak secara tidak langsung, dalam arti kebijakan moneter bergantung pada sektor perbankan untuk menambah atau mengurangi pinjaman ke sektor swasta dan pada sektor swasta untuk bertindak dengan cara yang diharapkan oleh otoritas moneter

Alokasi Kredit yang Berorientasi pada Tujuan Pendanaan perbankan sebaiknya disesuaikan dengan tujuan pemanfaatannya agar bermanfaat bagi semua pelaku bisnis dan masyarakat. Namun, saat ini banyak dana dari penabung kecil dialokasikan pada pengusaha besar. Perbankan enggan memberikan kredit pada usaha kecil karena resiko yang lebih tinggi, menyulitkan pertumbuhan usaha kecil. Skim penjaminan perlu diterapkan untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan usaha yang produktif sesuai dengan prinsip Islam.

2. Instrument Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam

Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda di setiap negara, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transaksi yang berlaku pada perekonomian negara tersebut. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan

sistem bunga sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang dari pada sektor riil. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan dari pada sektor riil.

Dalam sistem ekonomi Islam, perumusan dan penentuan instrumen moneter harus memperhatikan prinsip Islam seperti tidak ada aset bunga, peluang pendanaan jangka panjang dan pendek yang sama, tidak ada penimbunan uang, dan pembagian keuntungan berdasarkan rasio. Instrumen moneter Islam bertujuan menjaga keseimbangan sektor riil dan keuangan, mencegah penumpukan uang berlebihan, meningkatkan daya tahan ekonomi, dan optimalisasi alokasi sumber daya.

Menurut Karim (2006), instrumen moneter Islam dapat dibedakan berdasarkan tiga Mazhab:

Mazhab Pertama (Iqtishaduna) Pada masa awal Islam dapat dikatakan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran uang (M^3) melalui kebijakan diskresioner. Selain itu, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang, karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang saja serta peraturan pemerintah tentang surat peminjaman (*promissory notes*) dan instrumen negosiasi (*negotiable instruments*) dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan sistem kredit tersebut menciptakan uang. *Promissory Notes* atau *Bill of Exchange* dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa ataupun untuk mendapatkan sejumlah dana segar, namun surat tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Kreditor dapat menjual surat tersebut akan tetapi debitur tidak dapat menjual uang ataupun komoditi sebelum ia menerima surat tersebut. Karena itulah tidak ada pasar untuk jual-beli *negotiable instruments*, spekulasi dan penggunaan pasar uang menjadi tidak ada. Jadi sistem kredit tidak menciptakan uang. Aturan-aturan tersebut memengaruhi keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang berdasarkan transaksi tuna.

Mazhab Kedua (Mainstream) Pemaksimalan sumber daya yang tersedia, Chapra berpendapat bahwa dana bisa dipergunakan untuk kegiatan perekonomian sesuai manfaatnya, dengan penggunaan bagian "*dues of idle fund*" yakni pengaruh besar kecilnya permintaan uang sesuai akan pengalokasian pada meningkatnya produktivitas perekonomian secara menyeluruh

Mazhab Ketiga (Alternatif) Chodury menjabarkan kebijakan moneter melalui "*Syuratiq process*", yakni suatu kebijakan yang diperoleh oleh otoritas moneter merupakan hasil dari kesepakatan sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Hal ini bertujuan agar terciptanya harmonisasi antara kebijakan moneter dengan sektor riil.

3. Prinsip - Prinsip Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dalam islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam sebagai berikut:

1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut.
2. Manusia merupakan pemimpin (kholifah) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung.
4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
5. Kekayaan harus diputar.
6. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan.
7. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharam ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Prinsip-prinsip lain yang ada dalam kebijakan moneter secara sehat yaitu:

- a. Mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan (*overriding objective*)
- b. Kebijakan moneter bersifat antisipatif (*forward looking*)
- c. Mengikatkan diri kepada suatu mekanisme tertentu dalam membuat pertimbangan penentuan respon kebijakan moneter (*constrained discretion*)
- d. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat (*good governance*)

4. Aplikasi Instrumen Moneter Islam

a. Sudan

Sebelum syariah Islam diterapkan dalam sistem perbankan Sudan, Bank Sentral Sudan (BOS) bergantung pada instrumen langsung seperti suku bunga, plafon kredit, rasio likuiditas, dan tingkat diskonto. Namun, instrumen tersebut menyebabkan distorsi alokasi sumber daya bank, interferensi mekanisme harga, pembatasan kredit, dan distorsi kompetisi. Sebagai solusi, BOS beralih menggunakan instrumen tidak langsung seperti RR dan OMO.

Setelah syariah Islam diperkenalkan di Sudan pada tahun 1984, BOS mengeluarkan arahan kepada bank untuk mengikuti prinsip-prinsip perbankan syariah. BOS menghadapi tantangan mengganti instrumen moneter konvensional dengan yang sesuai syariah, mempertahankan peran pengawas bank, dan menerapkan kebijakan moneter. Instrumen-instrumen moneter BOS termasuk *Reserve Requirement*, rasio likuiditas, plafon kredit, margin keuntungan, penyeteroran minimum, jendela pembiayaan, aturan kualitatif dan kuantitatif, dan operasi valuta asing.

BOS juga menggunakan OMO dengan Central Bank Musharaka Certificate (CMC) sebagai pengendali likuiditas secara syariah. Selain itu, Government Musharaka Certificate (GMC) digunakan untuk pembiayaan anggaran, OMO, mobilitas tabungan, mendorong investasi, dan pengembangan pasar uang syariah. *Ijara Certificate* (sukuk) digunakan untuk pembangunan infrastruktur jangka panjang dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Sukuk adalah instrument finansial yang melibatkan perjanjian pembelian asset, sewa menyewa, dan penjualan asset. Ini menjadi solusi untuk memobilisasi simpanan jangka pendek dalam pembangunan infrastruktur. Dengan pendapatan dari sewa dan aset yang tersekuritisasi, sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

b. Iran

Iran adalah satu-satunya negara Islam yang menerapkan sistem perkembangan perekonomian mengacu pada pemikiran teori ekonomi Islam Mazhab I. Instrument moneter yang digunakan otoritas moneter Iran meliputi *Reserve Requirement Ratio*. Ketentuan rasio cadangan ini antara 10%-30%, digunakan untuk menyerap kelebihan dana bank. *Adjusted open market operations*, OMO disesuaikan tidak efektif di negara dengan pasar keuangan yang belum berkembang, penyesuaian diperlukan untuk menghindari penggunaan instrumen bunga. *Discount rates*. Tingkat diskon tidak sepenuhnya umum digunakan dalam sistem perbankan karena hukum riba, tetapi Bank Sentral dapat memberikan likuiditas pada bank-bank saat dibutuhkan, sesuai dengan prinsip Mazhab I. *Credit Ceiling*, Instrumen ini digunakan untuk mengendalikan penciptaan uang, pertumbuhan likuiditas oleh otoritas moneter. *Minimum Expected Profit Ratio of Bank's Share of Profit Various Contracts*. Bank Sentral menetapkan rasio

minimum dari keuntungan yang diharapkan dari berbagai kontrak bank.

c. Indonesia

Peraturan perbankan syariah yang dikeluarkan pada tahun 1998, yang menggantikan peraturan perbankan syariah tahun 1992, telah memungkinkan perkembangan perbankan syariah dengan cepat. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah cabang bank syariah baik dari bank umum syariah maupun divisi syariah dari bank umum konvensional. Penyerapan dana masyarakat juga meningkat, terlihat dari dana simpanan pihak ketiga di bank syariah. Bank Indonesia sebagai bank sentral harus lebih berhati-hati dalam memantau bank syariah sambil tetap memperhatikan pertumbuhannya.

Bank Indonesia memiliki instrumen-instrumen terhadap bank syariah, antara lain, Giro Wajib Minimum (GWM), yang merupakan simpanan minimum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang berdasarkan persentase dari dana pihak ketiga. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (Sertifikat IMA), digunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi bank syariah. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), digunakan dalam OMO dan sebagai sarana penitipan dana jangka pendek bagi bank syariah.

Bank Indonesia menetapkan denda untuk kesalahan dan keterlambatan dalam pelaporan mingguan terkait GWM. Sanksi diberikan kepada bank yang melanggar GWM. Sertifikat IMA memiliki jangka waktu 90 hari dan pembayaran dilakukan sebesar nilai nominal ditambah imbalan bagi hasil. SWBI memiliki nilai nominal minimum Rp500 juta dan pembayaran dilakukan melalui rekening giro di Bank Indonesia.

Dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, peranan uang dirasakan sangat penting. Hampir tidak ada satu pun bagian dari kehidupan ekonomi manusia yang tidak terkait dengan keberadaan uang. Pengalaman menunjukkan bahwa jumlah uang beredar di luar kendali dapat menimbulkan konsekuensi atau pengaruh yang buruk bagi perekonomian secara keseluruhan. Konsekuensi atau pengaruh buruk dari kurang terkendalinya perkembangan jumlah uang beredar tersebut antara lain dapat dilihat pada kurang terkendalinya perkembangan variabel-variabel ekonomi utama, yaitu tingkat produksi (*output*) dan harga.

Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah, maka kelesuan ekonomi akan terjadi. Apabila hal ini berlangsung terus menerus, kemakmuran masyarakat secara keseluruhan pada gilirannya akan mengalami penurunan. Kondisi tersebut antara lain melatar belakangi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara dalam mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Kegiatan pengendalian jumlah uang beredar tersebut lazimnya disebut dengan kebijakan moneter, yang pada dasarnya merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang ditempuh oleh otoritas moneter.

5. Manajemen Moneter Islami

Definisi paling singkat dari teori moneter adalah teori yang menjelaskan cara kerja pasar uang. Dalam konteks teori ekonomi, pasar tidak merujuk pada suatu tempat fisik di mana orang berjualan dan menjajakan barang dagangan. Sebaliknya, pasar berarti secara luas dan abstrak, namun tetap mencakup pengertian pasar dalam konteks sehari-hari, yaitu sebagai lokasi pertemuan antara permintaan dan penawaran. Jika permintaan dan penawaran bertemu di pasar, maka transaksi akan terjadi. Transaksi ini merupakan kesepakatan antara

apa yang diinginkan oleh pembeli dan apa yang diinginkan oleh penjual. Dalam transaksi tersebut, kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai dua hal, yaitu harga dan volume dari barang atau jasa yang ditransaksikan. Dalam konteks pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan Uang, yang digunakan untuk membelanjakan barang dan jasa, beroperasi dalam jangka waktu tertentu.

Pelaku utama dalam pasar uang terdiri dari kelompok kreditur, yang menawarkan dana, dan kelompok debitur, yang mencari dana. Namun, jika kita meninjau dari segi perannya dalam menciptakan uang yang beredar, terdapat tiga kelompok pelaku utama di pasar uang, yaitu: otoritas moneter, lembaga finansial, dan masyarakat. Dalam sistem Islam, struktur kelembagaan moneternya serupa dengan yang telah ada selama ini. Namun, sebagai sistem yang bebas bunga, Islam memiliki model operasional yang berbeda, yaitu :

1. Otoritas Moneter (Bank Sentral dan Pemerintah)

Memiliki peran utama sebagai sumber awal bagi terciptanya uang yang beredar. Kelompok pelaku ini bertindak sebagai penyedia penawaran (*supply*) uang kartal (C) untuk memenuhi permintaan (*demand*) dari masyarakat akan uang tersebut, serta menjadi sumber penawaran uang yang diperlukan oleh lembaga-lembaga keuangan atau cadangan bank (bank reserves) (R). Uang kartal dan cadangan bank merupakan sumber atau benih bagi semua unsur uang yang beredar, dan keduanya bersama-sama dikenal sebagai uang inti atau uang primer (*primary money*).

Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, Bank Sentral sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengelola persediaan uang akan menentukan program tahunan pertumbuhan persediaan uang yang diharapkan, selaras dengan tujuan ekonomi nasional. Sistem operasional yang digunakan dalam mendistribusikan uang yang beredar harus tetap bebas dari bunga. Salah satu skema yang dapat diterapkan adalah Bank Sentral akan membuka rekening investasi di bank-bank anggotanya sebagai deposito mudarabah.

2. Lembaga Keuangan (Bank dan Non-Bank)

Institusi uangan yang mencakup bank serta lembaga keuangan lain yang tidak berstatus sebagai bank, seperti lembaga investasi, perusahaan asuransi, serta kantor pos dan giro. Peranan utama lembaga ini adalah sebagai penyedia "penawaran uang giral" (DD), deposito berjangka (TD), simpanan tabungan (SD), dan berbagai aktiva keuangan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Otoritas moneter, bersama dengan lembaga keuangan, membentuk apa yang disebut sebagai "sistem moneter" atau monetary system.

Dengan demikian, "sistem moneter" atau monetary system berfungsi sebagai penyuplai seluruh kebutuhan uang bagi masyarakat; otoritas moneter memberikan uang primer (uang kartal) secara langsung kepada masyarakat, sementara lembaga keuangan menyediakan uang sekunder (DD, TD, SD, dan lainnya) kepada masyarakat, di mana uang sekunder ini dihasilkan oleh bank berdasarkan uang primer yang dimiliki oleh bank. Dalam konteks sistem Islam, tentu saja ini bukanlah bank konvensional, melainkan bank dan lembaga keuangan yang berbasis syariah.

3. Masyarakat (Rumah Tangga dan Perusahaan)

Masyarakat berfungsi sebagai konsumen akhir dari uang yang diciptakan, di mana mereka memanfaatkan uang tersebut untuk memperlancar kegiatan produksi, konsumsi, dan pertukaran.

Dari pembahasan ini, dapat terlihat bahwa uang yang beredar hadir melalui interaksi antara "penawaran dan permintaan". Selain itu, proses penciptaan uang dapat digambarkan sebagai "proses pasar", di mana jumlah uang yang beredar dapat meningkat atau menurun, tergantung pada tarik menarik antara permintaan dan

penawaran uang yang tercermin dalam perilaku para pelaku utama di pasar uang

6. Tantangan dan Kendala Penerapan Sistem Moneter Islam

Perkembangan menuju ekonomi syariah yang bersih dan bebas bunga di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah. Namun, masih ada ancaman terkait dengan penerapan sistem moneter Islam. Salah satunya adalah kaitannya dengan fanatisme agama dan alergi politik terhadap institusi syariah, yang membuat pemerintah merasa curiga terhadap Islam. Beberapa pihak mungkin juga menghalangi penerapan sistem moneter Islam karena ketidaksukaan terhadap kemajuan ekonomi umat Islam. Namun, sejarah pendirian bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut tidak beralasan. Isu eksklusivisme atau SARA juga mungkin digunakan untuk menghambat perkembangan sistem moneter Islam di Indonesia.

Kendala yang dihadapi termasuk kurangnya semangat penelitian dalam bidang ekonomi Islam, serta kesalahpahaman terhadap sistem tersebut. Banyak pakar ekonomi Islam Indonesia yang mendapatkan pendidikan dari Barat sehingga konsep ekonomi Islam tidak dijelaskan secara memadai. Sebagian cendekiawan muslim juga cenderung apriori terhadap konsep ekonomi yang bukan berasal dari Barat. Padahal, Alquran dan Hadis memiliki konsep sosial dan ekonomi yang relevan dengan zaman modern.

Penting untuk mengkaji sistem ekonomi Islam secara objektif dan ilmiah, tanpa terjebak pada sentimen agama. Tujuannya bukan untuk mendirikan negara Islam, melainkan untuk memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Selain itu, umat Islam perlu fokus pada substansi ajaran Islam, seperti konsistensi dalam tindakan sehari-hari, daripada hanya terpaku pada simbolisme agama. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah secara komprehensif.

Kesimpulannya, meskipun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menjanjikan, masih ada tantangan yang perlu diatasi seperti ketidaksukaan terhadap kemajuan Islam dan kurangnya semangat penelitian dalam bidang ekonomi Islam. Penting untuk mengedepankan substansi ajaran Islam dan menjauhi simbolisme semata. Dengan demikian, penerapan sistem moneter Islam dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kepatuhan terhadap hukum syariah perlu ditegakkan, terutama dalam bidang ekonomi, karena keterlibatan dengan ekonomi syariah dimulai dari keyakinan atau ideologi yang mengungguli pertimbangan pragmatis, berpotensi besar bagi pengembangan ekonomi syariah, termasuk manajemen moneter Islam. Para pengambil kebijakan, praktisi ekonomi Islam, dan pelaku bisnis dituntut untuk menjalankan prinsip syariah, sehingga tidak ada stigma negatif terhadap konsep atau institusi keuangan Islam.

Kekurangan sumber daya manusia merupakan hambatan dalam praktik ekonomi Islam, terutama di sektor perbankan syariah. Berdasarkan data Bank Indonesia, dalam 10 tahun ke depan diperlukan setidaknya 10 ribu SDM, namun perguruan tinggi belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Terdapat dikotomi antara pendidikan agama dan umum, yang berdampak pada perkembangan ekonomi Islam.

Ada dualisme intelektual antara ulama dan sarjana Muslim dalam pengembangan ekonomi Islam. Kategori ahli yang dibutuhkan mencakup spesialisasi ilmu syariah dalam ekonomi, spesialisasi ilmu ekonomi dalam syariah, dan keahlian di kedua bidang.

Kerjasama antara kedua disiplin serta pemahaman umat Islam tentang perbankan syariah diperlukan untuk mengatasi masalah dalam perekonomian kontemporer. Para cendekiawan muslim dan ekonom muslim diharapkan mampu mencegah tantangan dalam penerapan sistem ekonomi syariah dan manajemen moneter.

KESIMPULAN

Dalam rangka menerapkan instrumen moneter dalam ekonomi Islam terdapat hal yang perlu disiapkan dan beberapa hal yang menjadi tantangan. Hal ini meliputi upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan standar dan peraturan yang komprehensif untuk instrumen kebijakan keuangan Islam serta kita perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk memahami dan menerapkan mengenai pentingnya ekonomi syariah dan produk keuangan berbasis Syariah. Singkatnya, instrumen kebijakan keuangan Islam mewakili alternatif yang menarik untuk membangun sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan adil. Namun keberhasilan penerapan langkah ini akan sangat tergantung pada upaya yang berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi tantangan yang ada. Penelitian yang lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi potensi dan tantangan instrumen kebijakan keuangan Islam dalam konteks ekonomi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Askari, Hossein. 2015. *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. Singapore: John Wiley and Sons Singapore.
- Boediono, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1, Yogyakarta, BPFE, 1999. Hal 79
- Kalsum, U. (2016). Sistem Moneter Islam Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 9(1), 61-71.
- Karim, Adiwarmman Azwar. (2008). *Ekonomi Makro Islam*. Edisi 2 Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Karim, Adiwarmman Azwar. (2014). *Ekonomi Makro Islam*. Edisi 3 Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Karim, Adiwarmman Azwar. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Latifah, Nur. 2015. Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Modernisasi* Vol.11, No. 2
- M Juhro, S. (2020). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Mugiyati, M. (2008). Instrumen Kebijakan Moneter (Analisis Manajemen Moneter Islami) . *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 11(2 Des), 417-435.
- Munawar Iqbal dan M. Fahim Khan, *A Survey of Issues And Programme For Reseachr In Monetary And Fiscal Economics of Islam*, Jeddah, ICRIE King Abdul Aziz University, 1981.
- Putra, M. H., & Solehudin. A. (2022). Fundamentals of Economic and Monetary Policy in Islam, *Journal of Islamic Economics*, 7(1), 89-104. DOI: 10.29240/alfalah.v7i1.4302
- Sudirman, Wayan. 2011. Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
- Suryani, Yani, dan Desi Ika., Kebijakan Moneter Tanpa Bunga: Literatur Review, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 79-84. DOI: <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i2.855>
- Veizal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Wardhono, Adhitya, dan dkk. *Perilaku Kebijakan Bank Sentral*. 2019. Jawa Timur: Pustaka Abadi.